



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 36 TAHUN 2010**

TENTANG

PEDOMAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban mengembangkan kehidupan demokrasi;
- b. bahwa untuk pengembangan kehidupan demokrasi diperlukan pendidikan politik bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4972);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
4. Fasilitasi adalah dukungan pemerintah daerah dalam membantu memudahkan penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik di daerah.
5. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
6. Konsultasi adalah upaya yang dilaksanakan untuk sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana dan penyelenggaraan pendidikan politik di daerah.
7. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun penyelenggaraan pendidikan politik di daerah.
8. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.
10. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
11. Lembaga nirlaba lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk kelompok swadaya masyarakat lainnya.
12. Lembaga atau instansi vertikal di daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.
13. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

BAB II TUJUAN, SASARAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Pedoman fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik bertujuan untuk:

- a. memberikan arah kepada pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik; dan
- b. memberikan kemudahan bagi partai politik, partai politik lokal, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya, dan lembaga atau instansi vertikal di daerah dalam mengakses jalur-jalur terkait penyelenggaraan pendidikan politik di daerah.

Pasal 3

Sasaran fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik untuk:

- a. meningkatnya kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. meningkatnya kemandirian, kedewasaan, dan pencapaian prestasi dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan; dan
- c. berkembangnya karakter bangsa yang selaras dengan budaya dan sejarah bangsa.

Pasal 4

Prinsip fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik dilaksanakan secara adil, merata, transparan, dan non diskriminatif.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik meliputi:

- a. konsultasi;
- b. koordinasi;
- c. penyediaan sarana, prasarana; dan
- d. materi pendidikan politik.

BAB IV KEGIATAN FASILITASI

Pasal 6

Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik dapat diberikan terhadap kegiatan, antara lain:

- a. seminar dan lokakarya;
- b. sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan;
- c. asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis;
- d. pagelaran seni dan budaya;
- e. jambore, perkemahan, napak tilas; dan
- f. berbagai macam perlombaan seperti pidato, jalan sehat, cerdas tangkas, karya tulis ilmiah, film dokumenter, dan cipta lagu.

BAB V KELOMPOK SASARAN

Pasal 7

(1) Kelompok sasaran fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik meliputi:

- a. partai politik;
- b. partai politik lokal;
- c. organisasi kemasyarakatan;
- d. lembaga nirlaba lainnya; dan
- e. lembaga atau instansi vertikal di daerah.

- (2) Partai politik dan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan partai politik di daerah yang berbadan hukum.
- (3) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan organisasi yang berbadan hukum.
- (4) Lembaga nirlaba lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan lembaga yang tidak berbadan hukum tetapi memenuhi asas legalitas.
- (5) Lembaga nirlaba lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain berbentuk:
 - a. badan eksekutif mahasiswa;
 - b. dharma wanita;
 - c. pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. pondok pesantren;
 - e. paguyuban atau sejenisnya;
 - f. rukun tetangga;
 - g. rukun warga;
 - h. karang taruna; dan
 - i. kelompok swadaya masyarakat lainnya.
- (6) Lembaga atau instansi vertikal di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu instansi pusat yang berada di daerah dan merupakan bagian dari kementerian/lembaga.

BAB VI PELAKSANAAN FASILITASI

Pasal 8

- (1) Kelompok sasaran fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat melakukan konsultasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tertulis.
- (3) Konsultasi cara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui tatap muka dan/atau sarana telekomunikasi.
- (4) Konsultasi cara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengiriman surat dan/atau sarana komunikasi lainnya.

Pasal 9

- (1) Kelompok sasaran fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tertulis.
- (3) Koordinasi secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui tatap muka dan/atau sarana telekomunikasi.
- (4) Koordinasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengiriman surat dan/atau sarana komunikasi lainnya.

Pasal 10

- (1) Kelompok sasaran fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat menerima fasilitas penyediaan sarana dan prasarana yang difasilitasi oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. narasumber;
 - b. tempat; dan/atau
 - c. sarana pendukung lainnya.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kelompok sasaran fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat menerima fasilitas penyediaan materi yang difasilitasi oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri.
- (2) Materi pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi materi wajib dan materi pilihan.
- (3) Materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pancasila; dan
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Materi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. demokrasi;
 - b. hak asasi manusia;
 - c. sistem pemerintahan;
 - d. pertahanan dan keamanan;
 - e. budaya dan etika politik;
 - f. kebijakan publik;
 - g. pendidikan kewarganegaraan;
 - h. politik kesejahteraan sosial;
 - i. politik tata ruang dan lingkungan;
 - j. pemerintahan yang baik;
 - k. globalisasi dan politik luar negeri Indonesia;
 - l. partai politik;
 - m. otonomi daerah;
 - n. masyarakat sipil; dan
 - o. pasar dan dunia usaha.
- (5) Muatan materi pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Materi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (7) Materi pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam melakukan fasilitasi, satuan kerja perangkat daerah yang membidangi Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi/lembaga terkait.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan politik yang memperoleh fasilitasi dari pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan politik yang memperoleh fasilitasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 14

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi pemerintah daerah provinsi dilaporkan kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi pemerintah daerah kabupaten/kota dilaporkan kepada gubernur setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan evaluasi hasil pelaporan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, secara nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 16

- (1) Pendanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan politik oleh pemerintah provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah provinsi.
- (2) Pendanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan politik oleh pemerintah kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan atas fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik yang dilakukan oleh gubernur.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik yang dilakukan oleh bupati/walikota.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2010
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2010
**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 310

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 36 TAHUN 2010
TANGGAL : 22 JUNI 2010

MUATAN MATERI PENDIDIKAN POLITIK

NO	MATERI	CAKUPAN MATERI	NARASUMBER/PEMATERI	TARGET SASARAN
1	2	3	4	5
A.	Materi Wajib			
1.	Pancasila	Cakupan materi antara lain: a. Pancasila sebagai dasar negara; b. Pancasila sebagai ideologi; c. Pancasila sebagai falsafah; d. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa; e. Pancasila sebagai pemersatu bangsa; f. Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.	Narasumber/Pemateri dapat berasal antara lain dari: a. Akademisi b. Tokoh-tokoh masyarakat c. Pejabat pemerintah/pemda d. Tokoh-tokoh partai	Pendidikan politik diberikan kepada, antara lain: a. Aparatur negara; b. Dunia usaha dan industri; c. Organisasi sosial kemasyarakatan; d. Organisasi sosial politik (parpol, sayap parpol) e. Satuan pendidikan; f. Media massa; g. <i>Cyber media</i> ; dan h. Masyarakat umum/keluarga.
2.	UUD 1945	Cakupan materi antara lain: a. Paham konstitusionalisme dan negara hukum; b. Pembukaan dan pokok-pokok pikiran UUD 1945; c. Tema-tema pokok dalam batang tubuh; dan d. Amandemen UUD 1945.	Narasumber/Pemateri dapat berasal antara lain dari: a. Akademisi b. Tokoh-tokoh masyarakat c. Pejabat pemerintah/pemda d. Tokoh-tokoh partai	Pendidikan politik diberikan kepada, antara lain: a. Aparatur negara; b. Dunia usaha dan industri; c. Organisasi sosial kemasyarakatan; d. Organisasi sosial politik (parpol, sayap parpol) e. Satuan pendidikan; f. Media massa; g. <i>Cyber media</i> ; dan h. Masyarakat umum/keluarga.

NO	MATERI	CAKUPAN MATERI	NARASUMBER/PEMATERI	TARGET SASARAN
1	2	3	4	5
B.	Materi Pilihan			
1.	Demokrasi	Cakupan materi antara lain: a. Makna dan hakikat demokrasi; b. Model-model demokrasi yang ada di dunia; c. Demokrasi dan nomokrasi (demokrasi konstitusional); d. Sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia; e. Konsep demokrasi Pancasila; f. Demokrasi di era reformasi	Narasumber/Pemateri dapat berasal antara lain dari: a. Akademisi b. Tokoh-tokoh masyarakat c. Pejabat pemerintah/pemda d. Tokoh-tokoh partai	Pendidikan politik diberikan kepada, antara lain: a. Aparatur negara; b. Dunia usaha dan industri; c. Organisasi sosial kemasyarakatan; d. Organisasi sosial politik (parpol, sayap parpol) e. Satuan pendidikan; f. Media massa; g. <i>Cyber media</i> ; dan h. Masyarakat umum/keluarga.
2.	Hak Asasi Manusia	Cakupan materi antara lain: a. Falsafah hak asasi manusia; b. Sejarah perkembangan HAM di dunia; c. Prinsip-prinsip HAM; d. Konsep HAM dalam UUD 1945; e. Konsep HAM dalam UUD lainnya; f. Konsep HAM dalam UUD yang telah diamandemen; dan g. Hak warga negara dalam pemilu.	Narasumber/Pemateri dapat berasal antara lain dari: a. Akademisi b. Tokoh-tokoh masyarakat c. Pejabat pemerintah/pemda d. Tokoh-tokoh partai	Pendidikan politik diberikan kepada, antara lain: a. Aparatur negara; b. Dunia usaha dan industri; c. Organisasi sosial kemasyarakatan; d. Organisasi sosial politik (parpol, sayap parpol) e. Satuan pendidikan; f. Media massa; g. <i>Cyber media</i> ; dan h. Masyarakat umum/keluarga.
3.	Sistem Pemerintahan	Cakupan materi antara lain: a. Ciri-ciri pokok sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945; b. Pembagian kekuasaan menurut UUD 1945; c. Bentuk negara dan bentuk pemerintahan; d. Hubungan pusat dan daerah dalam NKRI; e. Perubahan sistem pemerintahan dalam sejarah Indonesia; f. Desentralisasi dan otonomisasi di era reformasi;	Narasumber/Pemateri dapat berasal antara lain dari: a. Akademisi b. Tokoh-tokoh masyarakat c. Pejabat pemerintah/pemda d. Tokoh-tokoh partai	Pendidikan politik diberikan kepada, antara lain: a. Aparatur negara; b. Dunia usaha dan industri; c. Organisasi sosial kemasyarakatan; 4. Organisasi sosial politik (parpol, sayap parpol) d. Satuan pendidikan; e. Media massa;

NO	MATERI	CAKUPAN MATERI	NARASUMBER/PEMATERI	TARGET SASARAN
1	2	3	4	5
		g. Sistem politik; dan h. Lembaga-lembaga tinggi negara.		f. <i>Cyber media</i> ; dan g. Masyarakat umum/keluarga.
4.	Pertahanan dan Keamanan	Cakupan materi antara lain: a. Pertahanan dan Keamanan dalam perspektif Pancasila/UUD 1945; b. Sistem Pertahanan Semesta; c. Sistem pertahanan keamanan nasional; dan d. <i>Human security</i> .	Narasumber/Pemateri dapat berasal antara lain dari: a. Akademisi b. Tokoh-tokoh masyarakat c. Pejabat pemerintah/pemda d. Tokoh-tokoh partai	Pendidikan politik diberikan kepada, antara lain: a. Aparatur negara; b. Dunia usaha dan industri; c. Organisasi sosial kemasyarakatan; d. Organisasi sosial politik (parpol, sayap parpol) e. Satuan pendidikan; f. Media massa; g. <i>Cyber media</i> ; dan h. Masyarakat umum/keluarga.
5.	Budaya dan Etika Politik	Cakupan materi antara lain: a. Konsep dasar tentang budaya dan etika politik; b. Budaya dan etika politik dalam tradisi Indonesia; c. Pentingnya budaya dan etika dalam perkembangan Politik; d. Budaya dan etika politik demokrasi e. Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi budaya dan etika politik; dan f. Budaya politik lokal.	Narasumber/Pemateri dapat berasal antara lain dari: a. Akademisi b. Tokoh-tokoh masyarakat c. Pejabat pemerintah/pemda d. Tokoh-tokoh partai	Pendidikan politik diberikan kepada, antara lain: a. aparaturnegara; b. dunia usaha dan industri; c. organisasi sosial kemasyarakatan; d. organisasi sosial politik (parpol, sayap parpol) e. satuan pendidikan; f. media massa; g. cyber media; dan h. masyarakat umum/keluarga.
6.	Kebijakan Publik	Cakupan Materi antara lain: a. Konsepsi tentang publik; b. Hakikat kebijakan publik; c. Landasan teoritik kebijakan publik; d. Prioritas kepentingan publik; e. Politik Anggaran (APBN dan APBD dalam kebijakan publik);	Narasumber/Pemateri dapat berasal antara lain dari: a. Akademisi b. Tokoh-tokoh masyarakat c. Pejabat pemerintah/pemda d. Tokoh-tokoh partai	Pendidikan politik diberikan kepada, antara lain: a. Aparatur negara; b. Dunia usaha dan industri; c. Organisasi sosial kemasyarakatan; d. Organisasi sosial politik (parpol, sayap parpol)

NO	MATERI	CAKUPAN MATERI	NARASUMBER/PEMATERI	TARGET SASARAN
1	2	3	4	5
		f. Kebijakan publik dan konflik kepentingan.		e. Satuan pendidikan; f. Media massa; g. <i>Cyber media</i> ; dan h. Masyarakat umum/keluarga.
7.	Pendidikan Kewarganegaraan	Cakupan materi antara lain: a. Konsep dasar warga negara; b. Hak dan kewajiban warga negara; c. Multikulturalisme dan kewargaan <i>multicultural</i> ; d. Indonesia sebagai negara persatuan (NKRI); e. Bhinneka Tunggal Ika; dan f. Undang-Undang Kewarganegaraan.	Narasumber/Pemateri dapat berasal antara lain dari: a. Akademisi b. Tokoh-tokoh masyarakat c. Pejabat pemerintah/pemda d. Tokoh-tokoh partai	Pendidikan politik diberikan kepada, antara lain: a. Aparatur negara; b. Dunia usaha dan industri; c. Organisasi sosial kemasyarakatan; d. Organisasi sosial politik (parpol, sayap parpol) e. Satuan pendidikan; f. Media massa; g. <i>Cyber media</i> ; dan h. Masyarakat umum/keluarga.
8.	Politik Kesejahteraan Sosial	Cakupan materi antara lain: a. Demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Pancasila; b. Konsepsi negara kesejahteraan; c. Jaminan sosial di dalam UUD 1945; d. Keterkaitan antara politik dan kesejahteraan sosial; e. Kebijakan ekonomi yang berorientasi kesejahteraan menurut konstitusi.	Narasumber/Pemateri dapat berasal antara lain dari: a. Akademisi b. Tokoh-tokoh masyarakat c. Pejabat pemerintah/pemda d. Tokoh-tokoh partai	Pendidikan politik diberikan kepada, antara lain: a. Aparatur negara; b. Dunia usaha dan industri; c. Organisasi sosial kemasyarakatan; d. Organisasi sosial politik (parpol, sayap parpol) e. Satuan pendidikan; f. Media massa; g. <i>Cyber media</i> ; dan h. Masyarakat umum/keluarga.
9.	Politik Tata Ruang dan Lingkungan	Cakupan materi antara lain: a. Mengetahui demokrasi lingkungan (<i>Cosmocracy</i>); b. Problem tata ruang dan lingkungan di Indonesia; c. Kebijakan tata ruang yang ramah manusia dan ramah lingkungan; d. Kebijakan lingkungan yang berorientasi	Narasumber/Pemateri dapat berasal antara lain dari: a. Akademisi b. Tokoh-tokoh masyarakat c. Pejabat pemerintah/pemda d. Tokoh-tokoh partai	Pendidikan politik diberikan kepada, antara lain: a. Aparatur negara; b. Dunia usaha dan industri; c. Organisasi sosial kemasyarakatan; d. Organisasi sosial politik (parpol,

NO	MATERI	CAKUPAN MATERI	NARASUMBER/PEMATERI	TARGET SASARAN
1	2	3	4	5
		kesinambungan dan keadilan; e. Pengaruh Pemanasan Global (<i>global warming</i>) bagi kebijakan tata ruang dan lingkungan; f. Sistem transportasi yang ramah lingkungan.		sayap parpol) e. Satuan pendidikan; f. Media massa; g. <i>Cyber media</i> ; dan h. Masyarakat umum/keluarga.
10.	Kepemerintahan Yang Baik	Cakupan materi antara lain: a. Arti penting Kepemerintahan Yang Baik; b. Prinsip-prinsip Kepemerintahan Yang Baik; c. Kepemerintahan Yang Baik Bersumber Nilai Budaya Bangsa.	Narasumber/Pemateri dapat berasal antara lain dari: a. Akademisi b. Tokoh-tokoh masyarakat c. Pejabat pemerintah/pemda d. Tokoh-tokoh partai	Pendidikan politik diberikan kepada, antara lain: a. Aparatur negara; b. Dunia usaha dan industri; c. Organisasi sosial kemasyarakatan; d. Organisasi sosial politik (parpol, sayap parpol) e. Satuan pendidikan; f. Media massa; g. <i>Cyber media</i> ; dan h. Masyarakat umum/keluarga.
11.	Globalisasi dan Politik Luar Negeri Indonesia	Cakupan materi antara lain: a. Memahami dan memaknai Globalisasi; b. Dampak globalisasi bagi negara dan masyarakat Indonesia; c. Strategi mengambil manfaat dan menghindari kerugian dari globalisasi; d. Relevansi politik luar negeri bebas aktif; e. Politik luar negeri bebas aktif pada setiap periode; dan f. Politik hutang berbasis konstitusi.	Narasumber/Pemateri dapat berasal antara lain dari: a. Akademisi b. Tokoh-tokoh masyarakat c. Pejabat pemerintah/pemda d. Tokoh-tokoh partai	Pendidikan politik diberikan kepada, antara lain: a. Aparatur negara; b. Dunia usaha dan industri; c. Organisasi sosial kemasyarakatan; d. Organisasi sosial politik (parpol, sayap parpol) e. Satuan pendidikan; f. Media massa; g. <i>Cyber media</i> ; dan h. Masyarakat umum/keluarga.
12.	Partai Politik	Cakupan materi antara lain: a. Pengertian partai politik; b. Peran dan fungsi partai politik; c. Partai politik dalam demokrasi; d. Perkembangan partai politik di Indonesia;	Narasumber/Pemateri dapat berasal antara lain dari: a. Akademisi b. Tokoh-tokoh masyarakat c. Pejabat pemerintah/pemda	Pendidikan politik diberikan kepada, antara lain: a. Aparatur negara; b. Dunia usaha dan industri; c. Organisasi sosial kemasyarakatan;

NO	MATERI	CAKUPAN MATERI	NARASUMBER/PEMATERI	TARGET SASARAN
1	2	3	4	5
		<p>e. Tantangan dan problematik partai politik di era reformasi;</p> <p>f. Partai Politik sebagai alat Perjuangan Bangsa; dan</p> <p>g. Paket Undang-Undang bidang Politik.</p>	<p>d. Tokoh-tokoh partai</p>	<p>d. Organisasi sosial politik (parpol, sayap parpol)</p> <p>e. Satuan pendidikan;</p> <p>f. Media massa;</p> <p>g. <i>Cyber media</i>; dan</p> <p>h. Masyarakat umum/keluarga.</p>
13.	Otonomi Daerah	<p>Cakupan materi antara lain:</p> <p>a. Peran daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>b. Latar belakang pemikiran otonomi daerah;</p> <p>c. Prinsip-prinsip otonomi daerah;</p> <p>d. Otonomi daerah dan demokrasi;</p> <p>e. Undang-Undang Pemerintahan Daerah;</p> <p>f. Pemilukada langsung masalah dan tantangannya.</p>	<p>Narasumber/Pemateri dapat berasal antara lain dari:</p> <p>a. Akademisi</p> <p>b. Tokoh-tokoh masyarakat</p> <p>c. Pejabat pemerintah/pemda</p> <p>d. Tokoh-tokoh partai</p>	<p>Pendidikan politik diberikan kepada, antara lain:</p> <p>a. Aparatur negara;</p> <p>b. Dunia usaha dan industri;</p> <p>c. Organisasi sosial kemasyarakatan;</p> <p>d. Organisasi sosial politik (parpol, sayap parpol)</p> <p>e. Satuan pendidikan;</p> <p>f. Media massa;</p> <p>g. <i>Cyber media</i>; dan</p> <p>h. Masyarakat umum/keluarga.</p>
14.	Masyarakat Sipil	<p>Cakupan materi antara lain:</p> <p>a. Pengertian masyarakat sipil; dan</p> <p>b. Hak dan kewajiban masyarakat sipil.</p>	<p>Narasumber/Pemateri dapat berasal antara lain dari:</p> <p>a. Akademisi</p> <p>b. Tokoh-tokoh masyarakat</p> <p>c. Pejabat pemerintah/pemda</p> <p>d. Tokoh-tokoh partai</p>	<p>Pendidikan politik diberikan kepada, antara lain:</p> <p>a. Aparatur negara;</p> <p>b. Dunia usaha dan industri;</p> <p>c. Organisasi sosial kemasyarakatan;</p> <p>d. Organisasi sosial politik (parpol, sayap parpol)</p> <p>e. Satuan pendidikan;</p> <p>f. Media massa;</p> <p>g. <i>Cyber media</i>; dan</p> <p>h. Masyarakat umum/keluarga.</p>
15.	Pasar dan Dunia Usaha	<p>Cakupan materi antara lain:</p> <p>a. Pengertian pasar dan dunia usaha; dan</p> <p>b. Hak dan kewajiban pasar dan dunia usaha.</p>	<p>Narasumber/Pemateri dapat berasal antara lain dari:</p> <p>a. Akademisi</p> <p>b. Tokoh-tokoh masyarakat</p>	<p>Pendidikan politik diberikan kepada, antara lain:</p> <p>a. Aparatur negara;</p> <p>b. Dunia usaha dan industri;</p>

NO	MATERI	CAKUPAN MATERI	NARASUMBER/PEMATERI	TARGET SASARAN
1	2	3	4	5
			c. Pejabat pemerintah/pemda d. Tokoh-tokoh partai	c. Organisasi sosial kemasyarakatan; d. Organisasi sosial politik (parpol, sayap parpol) e. Satuan pendidikan; f. Media massa; g. <i>Cyber media</i> ; dan h. Masyarakat umum/keluarga.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI